

RISALAH RAPAT

Hari/Tanggal : Kamis/13 Juli 2017
Waktu : 15.00 – 17.00 WIB
Tempat : Hotel Sari Pan Pacific
Jl. M. H. Thamrin No. 6, Jakarta Pusat
Perihal : Rapat Tindak Lanjut Rapat Terbatas (RATAS) Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Sumatera Selatan

Peserta : Hadir:

- Sekretariat Kabinet;
- Kantor Staf Presiden;
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- Kementerian ATR;
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- Kementerian Perhubungan (Direktorat Jenderal Perhubungan Laut);
- Kementerian PUPR (Direktorat Sumber Daya Air, Badan Pengatur Jalan Tol, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah);
- Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus;
- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- PT Utama Karya

Tidak Hadir:

- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
- Kementerian Keuangan;
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Kementerian BUMN;
- Kementerian Kelautan dan Perikanan

Agenda Rapat : Pembahasan tindak lanjut RATAS PSN di Provinsi Sumatera Selatan

Pembahasan :

Deputi 6 Kemenko Ekon bertugas untuk melakukan pemantauan untuk proyek strategis nasional (PSN).

a) Jalan Tol Palembang – Indralaya

Kepala Bappeda Sumatera Selatan:

Sampai 12 Juli 2017, progress Seksi I (Palembang – Pemulutan) mencapai 93,91 %, Seksi II (Pemulutan – KTM) mencapai 7,13 %, dan Seksi III (KTM – Indralaya) telah mencapai 72,45 %. Saat ini ruas-ruas sedang ditutup kembali pengerjaan sedang

dilanjutkan. Progress seksi 2 sempat terlambat karena terdapat masalah pengadaan tanah, yang saat ini sudah teratasi.

b) Jalan Tol Pematang Panggang – Kayu Agung

Kepala Bappeda Sumatera Selatan:

Proses pembebasan lahan sudah mencapai 100%, namun pembayaran baru dilakukan 20,4%. Pekerjaan fisik sudah mencapai 50km dan pada 2018 ditargetkan selesai hingga 77 km. Terdapat sebagian ruas yang belum dikeluarkan Penetapan Lokasinya di Sungai Sodong, akibat belum terbitnya IPPKH. Rekomendasi Gubernur sudah diberikan kepada Kementerian PUPR dan Kementerian PUPR akan menindaklanjuti rekomendasi Gubernur tersebut untuk penerbitan izin dari Menteri.

Perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK):

Ruas melewati hutan produksi sehingga membutuhkan IPPKH. Tetapi saat ini belum ada pengajuan IPPKH kepada Kementerian LHK. Surat yang sudah diterima oleh KLHK sejauh ini hanya surat rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan, sehingga dokumen persyaratan lain untuk pemrosesan IPPKH masih perlu dilengkapi.

Perwakilan Hutama Karya (HK):

Terkait beberapa masalah terkait pengadaan tanah yang diidentifikasi:

- a. Belum terbitnya IPPKH untuk ruas sepanjang 2.9km
- b. Terdapat kendala dalam proses konsinyasi tanah warga
- c. Belum dilakukannya Penetapan Lokasi untuk ruas sepanjang 3km di pertemuan ruas Kayu Agung – Palembang – Betung

Saat ini HK telah melakukan perjanjian *turnkey* dengan Waskita Karya untuk Jalan Tol Akses Tanjung Priok, sehingga dana jalan tol tersebut dapat digunakan untuk pengembangan ruas-ruas lain di Trans Sumatera.

Peraturan Presiden Penugasan HK untuk Jalan Tol Akses Tanjung Priok saat ini sedang dalam proses permintaan paraf dari Menteri, yang mana saat ini masih menunggu paraf Menteri Keuangan. Pada saat bersamaan akan dilakukan revisi Peraturan Pemerintah tentang Jalan Tol yang sebelumnya memiliki konflik dengan potensi penugasan yang akan diatur dalam Peraturan Presiden bersangkutan. Rencananya, pendapatan dari Jalan Tol Akses Tanjung Priok akan di-sekuritisasi untuk pembangunan jalan tol di Sumatera.

Untuk diklarifikasi lebih lanjut apakah Perpres Penugasan nantinya akan spesifik mengatur dan terbatas pada Ruas Pematang Panggang – Kayu Agung saja, atau dapat digunakan untuk pembangunan ruas lainnya.

c) Jalan Tol Palembang – Tanjung Api Api

Kepala Bappeda Sumatera Selatan:

Investor dari RRT telah menunjukkan ketertarikan berinvestasi pada proyek Jalan Tol Palembang – Tanjung Api Api. Ketertarikan investor ini seyogyanya dapat direpson dan ditindaklanjuti oleh Hutama Karya.

Perwakilan Hutama Karya (HK):

Proyek saat ini masih pada tahap penyusunan *Basic Design*. Selanjutnya dibutuhkan kejelasan dari Pemerintah terkait kelanjutan pembangunan jalan tol ini, mengingat pembangunan KEK Tanjung Api Api saat ini masih tertunda. Pihak HK saat ini berencana untuk memprioritaskan pembangunan jalan tol menuju bandara.

Perwakilan PMU KEK Tanjung Api Api:

Saat ini target COD KEK Tanjung Api Api diundur menjadi 31 Juli 2018. Adapun untuk pengembangan KEK Tanjung Api Api, saat ini Pemprov sebagai pemrakarsa, bersama dengan BUMD, sedang mencari *partner* untuk mengelola Kawasan.

Terkait rencana pengembangan Tanjung Carat, kajian FS telah disusun bersama dengan dengan Pelindo II di tahun 2012, yang menunjukkan bahwa IRR proyek kurang memadai – saat ini rencana Induk Pelabuhan Tanjung Carat telah selesai disusun. Pihak Pelindo II meminta adanya penugasan untuk pembangunan pelabuhan di Tanjung Carat. Adapun saat ini Pelindo 2 sedang melakukan proses *review* kajian FS, dengan mempertimbangkan potensi *tenant* nantinya di KEK Tanjung Api Api.

Perwakilan Direktorat Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan:

Pengembangan Tanjung Carat merupakan pengembangan terminal dari Pelabuhan Tanjung Api-Api, yang rencananya sudah dapat digunakan di tahun 2018. Apabila Tanjung Carat belum siap, Pelabuhan Tanjung Api Api eksisting dapat digunakan terlebih dahulu jika KEK sudah akan beroperasi nantinya.

Perwakilan Kantor Staf Presiden:

Mengingat keterkaitan yang erat antara jalan tol dan KEK, pembangunan jalan tol sebaiknya ditunda apabila pembangunan KEK belum siap.

Perwakilan Dewan KEK:

Gubernur telah berkirin surat untuk menunda operasi KEK menjadi 30 Juni 2018. Badan Usaha pengelola kawasan sudah terbentuk, dan sekarang sedang proses penyertaan modal.

Kepala Bappeda Sumatera Selatan:

Terkait potensi keterlibatan investor di pembangunan jalan tol, proyek seyogyanya agar tetap dilanjutkan dengan skema penugasan kepada Hutama Karya (HK), namun pihak HK dapat mencari *partner* untuk kerja sama.

d) Jalan tol *unsolicited*

Kepala Bappeda Sumatera Selatan:

Pembebasan lahan saat ini sudah mencapai 92%. Mengingat proyek merupakan proyek *unsolicited*, maka proses pembebasan lahan tidak dapat dilakukan dengan mekanisme konsinyasi. Oleh karena itu dibutuhkan suatu skema yang mengatur tata cara konsinyasi untuk proyek ini.

Terdapat 4 jalan tol tambahan pada daftar PSN baru. Keempat ruas ini masih dalam tahap lelang untuk penyusunan kajian, oleh karena itu diharapkan agar Pemerintah Pusat dan Utama Karya agar dapat mempercepat proses yang berlangsung.

e) KA Prabumulih – Kertapati

Kepala Bappeda Sumatera Selatan:

Realisasi fisik telah mencapai 62,5 %, dan ditargetkan selesai pada 2017.

Perwakilan Kementerian LHK:

Saat ini Instruksi Presiden (Inpres) tentang moratorium pemberian izin pinjam pakai hutan primer dan lahan gambut masa berlakunya akan segera habis, dan akan direvisi. Pada saat dilakukan revisi Inpres ini, diusulkan agar PSN kemudian mendapat pengecualian sehingga tidak mengganggu jalannya proyek proyek PSN.

f) KA Simpang Tanjung Api Api

Kepala Bappeda Sumatera Selatan:

Proyek ditargetkan selesai tahun 2020. Saat ini masih dalam proses penyelesaian dokumen perencanaan.

g) KA Muara Enim – Pulau Baai

Kepala Bappeda Sumatera Selatan:

Saat ini belum ada progress yang dilaporkan, karena merupakan usulan baru.

h) KA Tj Enim, Tj Api Api

Kepala Bappeda Sumatera Selatan:

Feasibility study (FS) sudah selesai disusun, sedangkan kajian AMDAL dan penyusunan *detailed engineering design* (DED) akan disusun tahun 2018. Saat ini dibutuhkan jaminan pengadaan tanah dari Pemerintah Daerah – PT PII menyatakan bahwa pemberian jaminan oleh PII membutuhkan kepastian pengadaan tanah. Terkait hal ini Gubernur akan mengajukan permohonan dukungan pengadaan tanah kepada Menteri Perhubungan, diikuti dengan permohonan Menteri Perhubungan kepada LMAN ditembuskan kepada KPPIP.

i) KA Palembang – Jambi

Kepala Bappeda Sumatera Selatan:

Saat ini sedang menyusun kajian perencanaan. Proyek ditargetkan selesai 2020.

j) LRT Sumatera Selatan (Metro Palembang) (23,5 km)

Kepala Bappeda Sumatera Selatan:

Realisasi fisik telah mencapai 37,061 %, ditargetkan untuk selesai di Juni 2018.

k) Upgrading kilang-kilang minyak eksisting

Kepala Bappeda Sumatera Selatan:

Saat ini proyek masih pada tahapan penyusunan *Feasibility Study* (FS).

l) Bendungan Komerling II (Tiga Dihaji)

Kepala Bappeda Sumatera Selatan:

Proses Pembebasan lahan telah selesai 100 % di Desember 2016, sedangkan pembayarannya ditargetkan selesai Desember 2017. Saat ini sedang dilakukan audit BPKP sebagai syarat pembayaran oleh LMAN.

m) Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Lematang

Kepala Bappeda Sumatera Selatan:

Kondisi lahan di saluran primer rawan longsor sehingga diperlukan tambahan anggaran untuk penahan tebing. Karena terdapat keterbatasan anggaran daerah untuk pembebasan lahan, diharapkan adanya dukungan anggaran Kemen PUPR.

n) KEK Tanjung Api-Api

Kepala Bappeda Sumatera Selatan:

Gubernur telah bersurat kepada Menko Perekonomian selaku ketua Dewan Nasional KEK, tentang usulan perluasan wilayah KEK Tanjung Api Api dengan menambahkan wilayah Tanjung Carat – adapun surat permohonan tersebut belum mendapat tanggapan dari Menko Perekonomian. Adapun saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sedang menyiapkan kajian FS dan AMDAL, sedangkan IPPKH untuk kawasan pengembangan Tanjung Carat sedang diproses. Terkait Izin Reklamasi, surat permohonan sudah dilayangkan ke Kementerian KKP, namun belum terdapat balasan yang dibutuhkan sebagai basis pelaksanaan reklamasi.



Komite Percepatan Penyediaan
Infrastruktur Prioritas

o) Institut Olah Raga Indonesia

Kepala Bappeda Sumatera Selatan:

Usulan tindak lanjut agar Kemenpora melakukan percepatan proses perijinan ke Kemenristekdikti dan percepatan penetapan kelembagaan ke Kemenpan-RB

p) Rumah Sakit Umum Sumatera Selatan (Non PSN)

Kepala Bappeda Sumatera Selatan:

Asistensi dengan Kemenkes pada Maret 2017, disepakati bahwa Kemenkes akan mendukung pemenuhan alat kesehatan RSUD Provinsi secara *multiyears* sebesar Rp.925.022.443.123,00 melalui DAK bidang kesehatan. Rapat koordinasi DAK bidang kesehatan di Jakarta tgl 12-14 Juni 2017, telah disetujui pengalokasian melalui DAK bidang kesehatan tahun 2018.

Penutup

KPPIP akan menyampaikan hasil rapat kepada Kementerian terkait proyek politeknik dan rumah sakit, yang pada rapat kali ini tidak hadir.



Komite Percepatan Penyediaan
Infrastruktur Prioritas

Tindak Lanjut

| No. | Proyek | Tindak Lanjut | Pelaksana | Target Pelaksanaan |
|-----|--------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|
| 1. | Usulan Proyek PSN Maluku Utara | Kementerian KKP untuk menjawab surat terkait permohonan izin reklamasi | Kementerian KKP | Minggu 1 Agustus 2017 |
| | | Kementerian Perhubungan dapat menetapkan DLKP dan DLKR sebagai landasan penerbitan izin reklamasi | Kementerian Perhubungan | Minggu 1 Agustus 2017 |
| | | Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyiapkan dokumen yang disyaratkan untuk perluasan KEK Tanjung Api-Api. | Pemprov Sumsel | September 2017 |
| | | Menko Perekonomian sebagai Ketua Dewan Nasional KEK, menjawab surat Gubernur tentang perluasan KEK Tanjung Api-Api untuk mencakup Tanjung Carat. | Kemenko Perekonomian | Minggu 1 Agustus 2017 |



Komite Percepatan Penyediaan
Infrastruktur Prioritas

| | | | | |
|----|--|--|------------------------------|---|
| | | Mengkaji Inpres Nomor 8 Tahun 2015 untuk memastikan dukungan percepatan proyek PSN | Kemenko Perekonomian | Minggu 4 Juli 2017 |
| 2. | Jalan Tol Pematang Panggang - Kayu Agung - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera | Menyampaikan permohonan IPPKH kepada Kementerian KLHK | Kementerian PUPR | Minggu 3 Agustus 2017 |
| | | Mengajukan penetapan lokasi untuk STA 182600 - 185600 | Kementerian PUPR | <i>Untuk didiskusikan dengan Kementerian PUPR</i> |
| | | Penerbitan penetapan lokasi untuk STA 182600 - 185600 | Gubernur Sumatera Selatan | <i>Untuk didiskusikan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan</i> |
| 3 | Jalan Tol Palembang – Tanjung Api Api (138 km) | Terkait usulan proyek-proyek PSN Maluku Utara, Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian teknis terkait | Hutama Karya, Pemprov Sumsel | <i>Oktober 2017</i> |



Komite Percepatan Penyediaan
Infrastruktur Prioritas

| | | | | |
|----------|--|---|-----------------|--|
| | | Akan dilakukan konfirmasi dan koordinasi dengan Kementerian Perindustrian terkait status IUI yang diperlukan untuk pengembangan smelter Buli. | Hutama Karya | <i>September 2017</i> |
| 4 | Jalan Tol Kayu Agung – Betung (112 km) | Kementerian ATR membantu menyelesaikan sisa proses pembebasan lahan (8%) | Kementerian ATR | <i>Minggu 1 Agustus 2017</i> |
| 5 | Berlaku untuk semua PSN | Kementerian LHK untuk mengusulkan agar proyek-proyek PSN mendapat perlakuan khusus/pengecualian dalam Instruksi Presiden yang akan direvisi, terkait moratorium pemberian izin pinjam pakai hutan primer dan lahan gambut | Kementerian LHK | <i>Untuk didiskusikan dengan Kementerian LHK</i> |